

PENGELOLAAN OBYEK PARIWISATA RESTING AREA DI KOTA TOMOHON

VALDANO YESIAS DONSU
MASJE S. PANGKEY
HELLY F. KOLON DAM

Email: Donsuvaldano1@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan teori dari George R. Terry mengungkapkan inti dari pengelolaan yang baik adalah meliputi empat hal yaitu (*planning*) perencanaan, (*organizing*) pengorganisasian, (*actuating*) penggerakan, (*controlling*) pengawasan. Pengelolaan adalah suatu seni atau cara yang berproses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Resting Area adalah tempat yang difungsikan untuk pemberhentian sementara pengguna jalan raya dan juga sebagai tempat daerah transit wisata. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Masalah perencanaan (*planning*) dimana perencanaan tidak berjalan dengan baik karena adanya potensi bencana di kawasan pariwisata tersebut karena konstruksi bangunan dan kualitas tanah yang tidak cocok dan Dinas Pariwisata sudah mengetahui namun belum melakukan usungan ke pemerintah pusat mengenai revisi bangunan, masalah pengorganisasian (*organizing*) atasan Dinas Pariwisata belum mampu mengkoordinir bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan obyek pariwisata Resting Area, masalah proses penggerakan (*actuating*) Dinas Pariwisata belum cukup baik dalam mendorong masyarakat sekitar obyek pariwisata agar turut berpartisipasi dalam memelihara dan membersihkan Resting Area, masalah pengawasan (*Controlling*) Dinas Pariwisata belum maksimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan kesibukan yang dimiliki pejabat dinas sehingga jarang turun langsung dilokasi mengingat lokasi Resting Area jauh dari pusat kota dan jauh dari pemukiman penduduk. Temuan hasil penelitian perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) yaitu Dinas Pariwisata belum baik dalam pengelolaan obyek pariwisata Resting Area di buktikan dengan belum adanya usungan perbaikan oleh Dinas Pariwisata ke Pemerintah Pusat tentang konstruksi bangunan Resting Area yang tidak sesuai dengan kualitas tanah dilokasi sehingga sampai saat ini belum ada perencanaan untuk revisi bangunan kiranya Dinas Pariwisata sebagai pelaksana teknis segera memberikan usungan ke pemerintah pusat agar dapat segera melakukan revisi bangunan supaya pengelolaan obyek pariwisata Resting Area tidak terhenti.

Kata Kunci : Pengelolaan, Obyek Pariwisata, Resting Area.

Abstract

The purpose of this study was to determine the management of Resting Area tourism objects in Tomohon City. This study uses the theory from George R. Terry revealed that the core of good management includes four things, namely planning, organizing, actuating, controlling. Management is an art or a process that starts from planning, organizing, directing, and supervising resources to achieve the stated goals. Tourism is a variety of tourism activities and is supported by various facilities and services provided by the community, business people, government, and local government. Resting Area is a place that is used for temporary stops of road users and also as a tourist transit area. In this study using qualitative research. The problem of the planning process (planning) where planning is not going well because of the potential for disasters in the tourism area due to construction of buildings and land quality that is not suitable and the Tourism Office already knows but has not carried a stretcher to the central government regarding building revisions, organizing problems. the Tourism Department's supervisor has not been able to coordinate the fields related to Resting Area tourism object management, the actuating process of the Tourism Department has not been good enough in encouraging the community around the tourism object to participate in maintaining and cleaning the Resting Area, controlling problems The Department of Tourism has not been optimal in conducting surveillance due to the busyness of the official of the office so that it rarely goes down directly to the location considering the location of the Resting Area is far from the city center and far from residential areas. Findings from the results of planning research, organizing, actuating, controlling that the Department of Tourism has not been

maximized in the management of tourism objects in the Resting Area is evidenced by the absence of stretcher improvements by the tourism department to the central government regarding the construction of Resting buildings Areas that are not in accordance with the quality of the land are located so that until now there has been no planning for building revisions so that the Tourism Office as a technical implementer will immediately provide stretchers to the central government so that they can immediately make revisions to the building so that the management of Resting Area tourism objects is not stopped.

Keywords : Management, Tourism Obyek, Resting Area

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan obyek pariwisata tepatnya di Kota Tomohon, salah satu yang pengelolaannya belum optimal adalah obyek pariwisata Resting Area, Resting area merupakan obyek pariwisata yang mempunyai panorama alam yang indah serta di dukung dengan udara yang sejuk yang merupakan ciri khas dari Kota Tomohon itu sendiri. Sejarah pengelolaan Resting Area merupakan tempat pariwisata yang cukup lama didirikan jika dibanding tempat pariwisata lainnya, pengoprasionalan Resting Area pada beberapa tahun yang lalu sangatlah baik dan banyak wisatawan yang singgah untuk berkunjung di tempat tersebut, namun pada saat ini kondisi obyek pariwisata Resting Area sangatlah memprihatinkan bisa dilihat dari fasilitas yang sudah tidak terawat bahkan lingkungan di obyek wisata yang tidak lagi bersih sudah tidak menggambarkan sebagai tempat pariwisata yang layak untuk dikunjungi, bahkan sebagaimana fungsinya sebagai tempat untuk beristirahat bagi pengguna jalan raya yang merasa lelah sangat sudah tidak layak lagi untuk digunakan untuk tempat singgah beristirahat.

Kawasan obyek pariwisata Resting Area dulunya berkembang dan dikelola dengan baik dengan menyajikan beberapa alternatif pariwisata lainnya seperti kuliner, benda hasil kerajinan tangan masyarakat lokal dan pengenalan budaya tari-tarian bahkan alat musik khas daerah, Infrastruktur bukan saja berfungsi mengikat geografi wilayah nusantara, tetapi juga memandu lahirnya partisipasi, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan keberhasilan pengembangan suatu daerah dapat dilakukan dengan memberikan kesejahteraan tiap warga

masyarakat secara adil dan optimal. Warga yang sejahtera cenderung bersifat integratif dan hubungan warga masyarakat dengan pemerintahan otomatis akan positif, sehingga masing-masing ingin memelihara manfaat dari hubungan tersebut (Nugraho, 2011). dengan begitu diharapkan dalam pengelolaan obyek pariwisata Resting Area bisa berjalan dengan baik, yang saat ini pengelolaannya terkesan belum maksimal.

Salah satu yang mendukung pariwisata yang ada di Kota Tomohon adalah obyek pariwisata Resting Area, Resting Area ini bukan hanya tempat untuk melakukan istirahat melainkan juga sebagai tempat yang merupakan daerah transit wisata (DTW), obyek pariwisata ini terletak di Kelurahan Tinoor Satu, yang kurang lebih memakan waktu 45 menit perjalanan dari bandara Sam Ratulangi, obyek pariwisata ini di bangun oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tomohon yang kemudian pemerintah memberi mandat kepada dinas pariwisata untuk menjadi pengelola kawasan obyek pariwisata Resting Area tersebut.

Pengelolaan Resting Area sebagai obyek pariwisata harus dikelola secara baik, sebab tempat obyek pariwisata menuntut kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja atau lembaga pengelola obyek pariwisata, hal ini harus melibatkan seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga kebersihan di kawasan obyek pariwisata tersebut agar tercipta obyek pariwisata

Resting Area yang bersih dan elok di pandang mata.

Resting Area merupakan kawasan obyek pariwisata yang terletak cukup jauh dari pemukiman penduduk ini dapat menyebabkan lemahnya pengelolaan obyek pariwisata tersebut yang pastinya pemerintah atau Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan perangkat kelurahan agar dapat menggerakkan masyarakat sekitar untuk turut mengambil bagian khususnya pada aspek pengawasan dan pemeliharaan di terhadap obyek pariwisata Resting Area. Pemerintah dan instansi yaitu Dinas Pariwisata Kota Tomohon pada awalnya merencanakan pembuatan obyek pariwisata Resting Area ini adalah untuk menjadi tempat peristirahatan dan juga tempat daerah transit untuk wisatawan yang mau berkunjung dan berwisata, namun yang terjadi dan bisa kita lihat bersama bahwa obyek pariwisata Resting Area tidak menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat apalagi untuk tempat transit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang hendak berwisata, dikarenakan lingkungan kawasan obyek pariwisata yang sudah tidak asri dan tidak terawat lagi bahkan fasilitas-fasilitas ditempat tersebut sudah banyak yang rusak dan tidak lagi di rawat oleh dinas terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan obyek pariwisata sangat perlu bagi manusia dalam memperoleh semangat, kesegaran pikiran setelah melakukan kegiatan pariwisatanya (Suwantoro 2002). Tidak setiap obyek pariwisata di suatu tempat dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang datang. Oleh karena itu ada beberapa hal yang penting sebagai syarat keberadaan obyek pariwisata yaitu apabila suatu obyek pariwisata tersebut memiliki daya tarik maka wisatawan yang berkunjung-pun semakin bertambah, namun apabila obyek pariwisata tersebut tidak memiliki daya tarik maka wisatawan yang berkunjung-pun sedikit, pengelolaan yang baik apabila menggunakan *planning* (pereencanaan),

(pengorganisasian), *actuating* (penggerakan) dan *controlling* (pengawasan).

George R. Terry (2006) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi;

1. Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus di laksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri, meliputi tempat tinggal orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialami dimana ia memperoleh pekerjaan tetap, pariwisata itu terdiri dari tiga unsur yaitu manusia (*man*), orang yang melakukan pariwisata, ruang (*space*), daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan, dan waktu (*time*), waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata, Wahab (1996). Pengertian yang lain

menyebutkan bahwa pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain keluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergian adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk kegiatan menghasilkan upah (Suwanto 2002).

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini yang didasari oleh sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang masalah peneliti, serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian akan menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana pengelolaan di obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2011:4), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku dapat diamati. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder Lofland (Moleong 2011) yaitu pertama data primer (data pokok) data yang diperoleh langsung dari orang yang ditetapkan sebagai informan yang akan diajak wawancara, data yang di maksud berupa pendapat, prespsi dan anggapan tentang berbagai faktor yang ada kaitannya langsung dengan penelitian ini yaitu data-data mengenai pengelolaan obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon. Kedua data sekunder (data pendukung) data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengutip data dari buku, jurnal, dokumen yang berupa arsip-arsip, laporan hasil, surat keputusan serta aturan- aturan yang berkaitan

atau relevan dengan judul penelitian penulis. Disamping itu peneliti melakukan teknik pengeumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan melakukan wawancara dengan 6 orang informant yang terdiri dari 4 orang pegawai Dinas Pariwisata, 1 masyarakat dan 1 duta pariwisata daerah Kota Tomohon. serta melakukan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Obyek Pariwisata Resting Area di Kota Tomohon. Terkait hasil penelitian dengan penelitian terdahulu serta teori yang dikemukakan oleh George Terry (2006) yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Soekartawi (2000), Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang berkaitan dengan tujuan dari Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pariwisata yang terus berupaya mencari cara untuk mengoprasionalkan kembali obyek pariwisata Resting Area yang berada di pintu masuk Kota Adiwiyata tersebut, hal ini dapat dilihat dengan adanya rencana untuk sosialisai ke masyarakat kelurahan sekitar tentang pentingnya pariwisata dan membuat jalinan kerjasama dengan Pemerintah Kelurahan dan Polisi Pamum Praja untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan pengawasan kawasan obyek pariwisata tersebut bahkan telah adanya pembangunan lampu taman bahkan anggaran untuk pembuatan jalan masuk beserta tempat sampah diberbagai titik.

Penelitian terdahulu oleh Robinson, T., B. Kiyai dan R. Mambo (2018). Penelitian ini mengemukakan strategi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow, pemerintah belum pro-aktif dalam menjalankan strategi pengembangan yang telah direncanakan dikarenakan kurangnya sodoran dana dari pemerintah

pusat. Dari hasil penelitian bantuan pemerintah berupa fasilitas restoran di dalam kawasan pariwisata yang di bangun untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tidak dijaga dan dirawat dengan baik oleh masyarakat sekitar sehingga mengalami kerusakan sampai sudah tidak beroperasi lagi sehingga menggagalkan rencana pemerintah agar masrakat yang berjualan di restoran tersebut yang akan turut menjaga dan merawat Resting Area mengingat belum adanya tenaga honorer yang ditempatkan di obyek pariwisata tersebut, Kondisi atau fenomena di Resting Area yang menyebabkan terhentinya proses pengelolaan di kawasan tersebut dikarenakan adanya penelitian yang mengatakan bahwa terjadi ketidak cocokan antara kontruksi bangunan dan kualitas tanah dikawasan obyek pariwisata Resting Area dan sampai saat ini Dinas Pariwisata belum mengusungkan ke Pemerintah Pusat mengenai rencana revisi bangunan.

Disimpulkan perencanaan di obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon belum cukup baik, karena sudah ada temuan yang menjelaskan tentang kontruksi bangunan yang tidak cocok dengan kualitas tanah namun pemerintah atau dinas terkait belum merencanakan revisi bangunan sehingga obyek pariwisata tersebut sampai saat ini masih terdiam. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata yaitu harus mengusungkan ke pemerintah pusat mengenai revisi bangunan agar tidak terjadinya bangunan roboh dan membahayakan pengunjung obyek pariwisata tersebut.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Melayu Hasibuan (2006) mendefinisikan pengorganisasian sebagai penentu, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian terdiri dari penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan serta tanggung jawab pengelola obyek pariwisata Resting Area di Kelurahan Tinoor 1 Kecamatan Tomohon Utara, berupa tugas pokok melaksanakan

kegiatan teknis oprasional dan kegiatan teknis penunjang, Pelaporan dilakukan secara lisan dari petugas kepada kepala dinas untuk dalam hal menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan di tempat pariwisata. Sedangkan pelaporan secara administrasi dilakukan secara tertulis kepada bendahara penerima Dinas Pariwisata Kota Tomohon mengenai jumlah dan keluar ataupun dana masuk untuk pengelolaan obyek pariwisata Resting Area. Usaha untuk mendorong berbagai pihak seperti Pemerintah Kelurahan dan masyarakat sekitar untuk turut membantu dalam pemeliharaan dan pengawasan obyek pariwisata tersebut sudah dilakukan dengan baik, Namun berbagai masalah justru muncul yaitu seperti fasilitas obyek pariwisata yang rusak akibat bencana alam maupun yang rusak pada tenga malam ketika tempat tersebut sudah tidak dijaga, untuk saat ini pemerintah telah mengindahkan aspirasi masyarakat sekitar terkait dengan pemasangan lampu taman untuk mencegah pesta miras ditempat tersebut mengingat tempat pariwisata tersebut sangat gelap pada malam hari dan pengadaan tempat sampah dibeberapa titik kawasan pariwisata tersebut agar dapat mengurangi sampah yang berserakan. Dan Pemerintah Kelurahan sudah baik dalam mengkoordinir masyarakat sekitar untuk bersama melakukan kerja bakti dalam rangka pembersihan kawasan pariwisata tersebut namun saat kerja bakti dilaksanakan dan saat rumput telah panjang dan memerlukan mesin pemotong rumput dan bahan bakarnya, disini bahan bakar yang disediakan masih diluar tanggung jawab pihak pengelola yaitu Dinas Pariwisata sehingga mau tidak mau masyarakat yang melakukan kerja bakti mengeluarkan uang patungan untuk membeli bahan bakar mesin paras rumput.

Penelitian terdahulu oleh Binambuni, A., G. Tampi dan R. Mambo (2019). Peneliti mengemukakan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah khususnya Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado belum cukup baik dalam melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang

ada baik itu sumber daya manusia yang ada dalam lingkup internal yang bekerja di Dinas Pariwisata maupun sumberdaya manusia seperti Aparat Kelurahan terkait dan Masyarakat Kelurahan Bunaken. Hasil penelitian pengorganisasian oleh dinas pariwisata berkaitan dengan pengelolaan pariwisata Resting Area di Kota Tomohon menurut informan pengorganisasian tersebut belum cukup baik karena Kepala Dinas Pariwisata belum dapat mengkoordinir setiap sumber daya manusia yang ada di dinas pariwisata untuk bekerja sesuai dengan bidang masing-masing khususnya bidang pengembangan destinasi dan bidang kemitraan belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seperti belum melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat sekitar dan juga belum melakukan kerjasama dengan aparat Kelurahan sekitar obyek pariwisata Resting Area agar dapat membantu pemerintah dalam menjaga dan melestarikan obyek pariwisata tersebut.

Disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian belum dilakukan dengan baik, langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah melakukan kerjasama dengan Aparat Kelurahan dan Masyarakat sekitar obyek pariwisata dan melakukan usungan ke pemerintah pusat agar dapat menghubungi pihak perencanaan umum mengenai pemasangan listrik dan air di obyek pariwisata tersebut.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Sondang S. Siagian (2018), Penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Penggerakan dilakukan agar lebih tertuju kepada tujuan yang akan dicapai dari obyek pariwisata Resting Area. Hal tersebut dilakukan dengan saling mengingatkan antar Pemerintah Kota melalui Dinas Pariwisata serta Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat setempat maupun pungunjung obyek pariwisata untuk mendukung program dari Pemerintah Kota

dengan ikut berpartisipasi menjaga dan merawat obyek Parwisata Resting Area sehingga dengan demikian penggerakan yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup baik dengan belum adanya partisipasi dari berbagai kalangan, juga pemerintah masih mencari oknum swasta untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan obyek pariwisata tersebut. Penggerakan promosi obyek pariwisata Resting Area belum berjalan dengan baik dikarenakan belum dibangunnya kembali fasilitas-fasilitas yang menunjang pesona obyek pariwisata fasilitas-fasilitas pendukung fungsi dari Resting Area tersebut seperti pondok peristirahatan bahkan restoran untuk makan belum dibangun kembali sehingga belum menarik perhatian wisatawan dan masrakat luas untuk singga berkunjung di tempat tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Sijabat, T., F. Tulusan dan J. Ruru (2019). Peneliti mengemukakan penggerakan yang dilakukan pemerintah belum cukup baik dimana pemerintah belum mampu menggerakan pihak swasta yang mengelola obyek pariwisata Pantai Lumintang untuk bekerja dengan baik dan mempehatikan kebersihan lingkungan sekitar. Hasil Peneliti masyarakat sekitar belum dapat dipengaruhi oleh pemerintah untuk sadar akan pentingnya pariwisata sehingga dapat membantu pemerintah dalam pemeliharaan dan pengawasan obyek pariwisata Resting Area. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan sosialiasi dan kegiatan-kegiatan di Resting Area yang dapat menarik perhatian masyarakat agar sadar akan pentingnya pariwisata dalam peningkatan ekonomi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengawasan obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon.

Disimpulkan bahwa penggerakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata belum cukup baik mengingat belum adanya kerjasama baik lingkup internal dinas pariwisata maupun kerjasama lintas sektoral bahkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat sekitar yang nantinya dapat bergandeng tangan dalam

pengelolaan obyek pariwisata Resting Area agar obyek pariwisata ini tidak terdiam dan dapat dioprasionalkan kembali.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Admosudirdjo (2005), Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap pengelolaan obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon, masih sangat kurang sehingga perbaikan dan pembangunan kembali perlu dilakukan pada fasilitas-fasilitas yang ada di obyek pariwisata Resting Area yang masih belum dilakukan serta pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya tak kunjung diadakan. Karena minimnya pengawasan dari Pemerintah Kota melalui Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang dikarenakan pemerintah yang jarang turun langsung melihat keadaan obyek pariwisata yang terletak di pintu masuk Kota Tomohon tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Rading, G., B. Kiyai dan G. Tampi (2018). Peneliti mengemukakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai fasilitas dan aksesibilitas belum cukup baik mengingat masih banyak terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan belum adanya pembaharuan fasilitas baru yang nantinya akan berpengaruh pada daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Hasil peneliti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata di obyek pariwisata Resting Area masih belum cukup baik dikarenakan banyaknya pengrusakan-pengrusakan kembali fasilitas yang ada di obyek pariwisata tersebut dan obyek pariwisata tersebut masi saja sering digunakan untuk pesta miras dan seks bebas. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah terus melakukan kerjasama dengan Polisi Pamum Praja dalam mengawasi obyek pariwisata tersebut dan bekerjasama

dengan Aparat Kelurahan sekitar agar dapat turut membantu dan menggerakkan masyarakatnya dalam proses pengawasan obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yang dilihat dari proses pengelolaan obyek pariwisata Resting Area dan hasil dari kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan pemerintah belum cukup baik dikarenakan Dinas Pariwisata sebagai pelaksana teknis pengelolaan obyek pariwisata Resting Area yang sudah mengetahui ketidakcocokan antara konstruksi bangunan Resting Area dengan kualitas tanah yang ada dikawasan pariwisata tersebut yang akan berpotensi bencana, Namun sampai saat ini belum ada perencanaan untuk melakukan revisi bangunan dan juga belum ada inisiatif untuk memberi usungan ke pemerintah pusat mengenai konstruksi bangunan yang ada di Resting Area agar dapat dilakukan revisi bangunan atau perbaikan bangunan.
2. Pengorganisasian terdiri dari penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan juga tanggung jawab pengelola dan Dinas Pariwisata serta tugas pokok teknik operasional dan tugas penunjang, namun pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih belum secara serius dijalankan, buktinya masih ada hal-hal yang perlu dilakukan dan perlu pengadaan untuk menjawab kebutuhan yang ada di obyek pariwisata.
3. Penggerakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata belum berjalan dengan baik mengingat

belum rutinnya dorongan terhadap masyarakat agar terus menjaga dan melestarikan obyek pariwisata seperti dorongan kegiatan untuk kerja bakti di kawasan pariwisata tersebut, dan juga pemerintah belum secara rutin dalam melakukan kegiatan promosi obyek pariwisata Resting Area sehingga obyek pariwisata tersebut pengoprasionalannya belum cukup baik dan tidak berjalan sesuai dengan fungsi dari dibangunnya obyek pariwisata tersebut yaitu sebagai tempat persinggahan istirahat sementara. Partisipasi masyarakat terhadap pelestarian kawasan pariwisata Resting Area masih kurang untuk mendukung program pemerintah.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata masih sangat kurang baik, ini yang menyebabkan pengelolaan obyek pariwisata Resting Area belum cukup baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis dapat sampaikan kepada Pemerintah yakni Dinas Pariwisata agar pengelolaan obyek pariwisata Resting Area di Kota Tomohon dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Untuk tahap perencanaan kiranya Dinas Pariwisata harus berinisiatif untuk memberikan usungan perbaikan mengenai kontruksi bangunan ke Pemerintah Pusat
2. Dalam tahap pengorganisasian Kepala Dinas Pariwisata dapat mengkoordinir setiap bidang yang terkait dengan pengelolaan obyek pariwisata Resting Area agar dapat lebih memperhatikan obyek pariwisata tersebut.
3. Pada tahap penggerakan Dinas Pariwisata harus lebih giat lagi dalam membangkitkan dan mendorong semua pihak untuk bekerjasama dalam pengoprasionalan kembali obyek pariwisata Resting Area.

Tahap pengawasan, kiranya Dinas Pariwisata sering berkoordinasi dengan Sat Pol PP, Pemerintah Kelurahan, juga masyarakat sekitar dan bahkan sering mengunjungi langsung Resting Area untuk bersama melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damardjati, R.S. 2001. *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Darwis, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: CV. Witra Irzami.
- Effendi, U. 2014. *Asas-asas Manajemen*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hadinoto, K. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Handoko. 2000. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harahap. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Ghalia Utama.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, S. 2013. *Pengantar Manajemen, Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Irawan, D.H. 2009. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Karyono, H. 1997. *Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Komaruddin. 1994. *Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manullang. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, H. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pitana, I. G. dan Diarta, S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.
- Pratama, B. Aditya. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo.

- Suansri, Potjana. 2008. *Community Based Tourism Handbook*. Bandung: Suryana.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suwantoro. 2002. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Terry. R.George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Sukarna.
- Jurnal :
- Binambuni, A., G. Tampi dan R. Mambo. 2019. *Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Bunaken*. Jurnal Administrasi Publik FISIP UNSRAT. 5(70)
- Rading, G., B. Kiyai dan G. Tampi. 2018. *Peran Pemerintah Desa pada Pengembangan Obyek Pariwisata Gunung Api Bawa Laut Wuhu*. Jurnal Administrasi Publik FISIP UNSRAT. 15(72).
- Robinson, T., B. Kiyai dan R. Mambo 2018. *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata*. Jurnal Administrasi Publik FISIP UNSRAT. 5(084)
- Sijabat, T., F. Tulus dan J. Ruru 2019. *Presepsi Masyarakat Tentang Pengembangan Pariwisata Pantai Lumintang Desa Bentenan Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Administrasi Publik FISIP UNSRAT. 3(046)
- Takaliung, A., M. Ogotan dan N. Plangiten 2016. *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik FISIP UNSRAT. 3(41).
- Sumber-Sumber Lain:
- Peraturan Presiden No.67 tahun 2005.
- Peraturan Menteri Pariwisata RI No.3 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.4 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah Kota Tomohon No.20 Tahun 2005 tentang Retribusi Pariwisata dan Kebudayaan.
- Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Tomohon.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-undang No. 9 tahun 1990 Visi dan Misi Dinas Pariwisata.